

“KITA NGGAK BISA APA-APA..”
STUDI MENGENAI ADAPTASI INDIVIDU TERHADAP BUDAYA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI WILAYAH X

Falasifatul Falah

Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 50112, Indonesia
E-mail: falasifatul.falah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi individu terhadap budaya korupsi di lingkungan kerjanya. Data diperoleh dengan wawancara dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku korupsi di Lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah di wilayah X merupakan bagian dari perilaku sistemik yang sudah menjadi budaya. Individu yang nilai-nilai pribadinya berlawanan dengan sistem yang korup tidak mampu melawan tekanan sosial sehingga terpaksa melakukan adaptasi dan rasionalisasi untuk membenarkan ketidakmampuannya melawan sistem yang korup. Keterlibatan yang berlangsung secara terus-menerus diyakini akan membuat individu menjadi bagian yang aktif dari sistem yang korup.

Kata kunci: *adaptasi individu, budaya korupsi, lingkungan pendidikan*

“WE CAN DO NOTHING”

**INDIVIDUAL ADAPTATION TO CULTURE OF CORRUPTION IN PRIMARY AND
HIGH EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN REGION X**

ABSTRACT

This study aims to reveal the factors that affect individual adaptation to the culture of corruption in the work environment. Data were obtained by interview and analyzed by qualitative approach. The results showed that corruption in the Elementary and Secondary Education Environment in the region X is part of systemic behavior which has become a culture. Individuals whose personal values against the corrupt system is not able to resist social pressure and had to do the adaptation and rationalization to justify his inability to fight the corrupt system. Long-time involvement in corruption activities is believed would make the individual become an active part of the corrupt system.

Keywords: *individual adaptation, culture of corruption, educational environment*

PENDAHULUAN

Menjelang akhir tahun 2014 Lembaga Transparansi Internasional mengumumkan indeks persepsi Indonesia dalam pemberantasan korupsi masih berada pada angka 34 dengan posisi pada peringkat 107 dari 175 negara, belum beranjak jauh dari posisi tahun sebelumnya dengan indeks 32 dan ranking 114

dari 177 negara (Transparency International, 2014).

Korupsi di Indonesia merupakan kombinasi *administrative corruption* (penyimpangan pelaksanaan peraturan) dan *state corruption* yang sudah sampai tahap-tahap dalam pembuatan aturan main (*rules of the games*) (Sujatmiko, 2002).

Perilaku korupsi di Indonesia merambah hampir di segala bidang termasuk dalam dunia pendidikan. Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam kajian mengenai korupsi pendidikan selama satu dekade (2003-2013) mengungkapkan banyaknya penggelapan dan *mark up* terhadap anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang seharusnya digunakan untuk membangun dan memperbaiki bangunan sekolah serta sarana dan prasarana sekolah yang lain, dengan kerugian mencapai 265,1 miliar rupiah (Puspitarini, 2013). Salah satu kasus yang menggambarkan bahwa tindak korupsi biasanya dilakukan secara kolektif adalah peristiwa di mana seorang oknum kepala sekolah, oknum kepala UPTD, serta oknum dari LSM tertangkap tangan menerima sejumlah uang setoran dari 21 kepala SD di Kabupaten Banyuwangi, yang dipotong dari bantuan DAK yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang dipimpin para kepala SD tersebut (Rachmawati, 2014).

Kebijakan pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikeluarkan sejak tahun 2005 (Nugroho, Widowati, & Rihandoyo, 2013). Bantuan ini juga sering menjadi sasaran aktivitas korupsi, misalnya kasus oknum kepala sekolah di Bandar Lampung yang didakwa atas tindakan korupsi terhadap dana BOS sebesar Rp. 86 juta (Hermanto, 2014). Dugaan penyimpangan sasaran dana BOS tahun 2009 di Kabupaten Jember, Jawa Timur, juga menyebabkan tim penyidik Kejaksaan Negeri Jember memeriksa sedikitnya 900 orang kepala sekolah di Kabupaten Jember (Djunaidy, 2012). Menurut kajian ICW pada tahun 2011, 'korupsi massal dan sistematis' dalam penggunaan dana BOS terjadi karena penyaluran bantuan yang sering terlambat serta karena sistem monitoring penggunaan bantuan yang tidak berjalan dengan baik (Nugroho, Widowati, & Rihandoyo, 2013).

Tindak korupsi dalam dunia pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, selain menjadikan DAK dan BOS sebagai sasaran, juga terjadi dalam berbagai bentuk lain, misalnya

praktik suap-menyuap dalam penerimaan siswa baru di mana orang tua murid memberikan sejumlah uang agar anaknya diterima di sekolah negeri tertentu (Nurdiansyah, 2014).

Korupsi di lingkungan sekolah bukan hanya terjadi di Indonesia. Organisasi yang mengkampanyekan gerakan antikorupsi, Transparansi Internasional, pada tahun 2013 mempublikasikan hasil survei global yang menunjukkan bahwa sekitar satu dari enam harus mengeluarkan uang suap untuk memperoleh pelayanan pendidikan (Coughlan, 2013). Organisasi Pengawas Korupsi (*Corruption Watch*) di Afrika Selatan mengungkapkan bahwa sejak dibukanya bagian khusus pengawasan korupsi di lingkungan pendidikan, laporan tentang tindak korupsi di sekolah meningkat dengan pesat, mencapai 12% dari keseluruhan dugaan korupsi yang dilaporkan (Sapa, 2014). Di Ukraina sedikitnya 30% dari pelajar Ukraina harus mengeluarkan uang suap untuk diterima di kampus, sementara banyak lainnya yang masuk dengan memanfaatkan koneksinya di fakultas dan bagian administrasi (Osipian, 2009).

Peneliti tertarik untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan individu beradaptasi terhadap budaya korupsi di lingkungan kerjanya dan secara langsung maupun tidak langsung ikut melanggengkan fenomena korupsi di lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

Korupsi dalam pandangan Osborne adalah pembusukan sosial (Osipian, 2009). Rabl (2008); Vahlenkamp dan Knau serta Rabl dan Kuhlmann (2008) menyusun pengertian korupsi sebagai: perilaku yang tidak lurus yang muncul dalam bentuk penyalahgunaan amanah; yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi pelakunya sendiri atau bagi pihak lain; dan merupakan transaksi atau pertukaran keuntungan dan imbalan yang bersifat rahasia di antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan yang korup; serta

menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik secara ekonomi, sosial atau politik (Rabl, 2011).

Gejala korupsi menurut ukurannya dibedakan sebagai *grand corruption* dan *petty corruption*; sedangkan menurut prosesnya gejala korupsi dibedakan sebagai *incidental*, *systematic* dan *systemic* (Sujatmiko, 2002).

Anechiarico dan Jacobs mendefinisikan korupsi dalam pendidikan sebagai penyalahgunaan wewenang demi mendapatkan keuntungan materi; tetapi Heyneman beralasan bahwa karena pendidikan adalah sektor publik yang sangat penting, maka standar profesionalnya bukan hanya meliputi materi saja, tetapi juga termasuk penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi (Osipian, 2009).

Korupsi dalam dunia pendidikan dikategorikan sebagai: (1) Fungsi yang korup; (2) Sistem akreditasi yang korup; dan (3) Penyelesaian yang korup (Heyneman, 2004).

Elemen-elemen perilaku tidak layak yang dilakukan oleh pengelola institusi pendidikan atau pengajar (*professional misconduct*) adalah: (1) Menerima hadiah atau imbalan materi sebagai pertukaran nilai, asesmen, atau seleksi untuk masuk program tertentu; (2) Memberikan penilaian yang bias karena ras, budaya, kelas sosial, etnis/suku, dan atribut-atribut lain yang bersifat SARA; (3) Memaksa siswa mengikuti filosofi atau nilai pribadi pengajar/pengelola sekolah; (4) Membuka informasi yang bersifat pribadi/rahasia mengenai siswa; (5) melakukan eksploitasi, pelecehan, atau diskriminasi terhadap siswa; (6) Menggunakan buku teks atau bahan ajar yang tidak memadai semata-mata karena mendapatkan insentif dari produsen buku/bahan ajar tersebut; (7) Memaksa siswa membeli bahan ajar atau perlengkapan lain yang menguntungkan pengajar/pengelola sekolah tersebut; (8) Mengabaikan perilaku kolega yang tidak profesional atau tidak pantas; (9) Menggunakan properti sekolah untuk kepentingan pribadi yang bersifat komersial (Heyneman, 2004).

Sistem sekolah yang telah bebas dari korupsi harus memenuhi karakter sebagai berikut: (1) Kesetaraan dalam akses untuk mendapatkan kesempatan pendidikan; (2) Keadilan dalam distribusi kurikulum dan materi pendidikan; (3) Keadilan dan transparansi dalam kriteria untuk menyeleksi pelatihan-pelatihan yang tingkatnya lebih tinggi dan khusus; (4) Keadilan dalam akreditasi di mana semua institusi dinilai dengan standar profesional yang setara dan terbuka untuk diuji oleh publik; (5) keadilan dalam penerimaan benda-benda maupun jasa pendidikan; (6) keseimbangan dan kemurahan hati pada kurikulum dalam memperlakukan kelompok minoritas dan tetangga geografis; serta (7) pemeliharaan standar profesional tingkah laku dari para pengelola institusi pendidikan maupun para pengajar, baik di institusi negeri maupun swasta (Heyneman, 2004).

Falah mengungkapkan bahwa ada korelasi antara sikap terhadap korupsi dengan sikap terhadap ketidakjujuran akademik (*academic dishonesty*) pada mahasiswa serta aktivis partai politik (Falah, *Attitude Toward Corruption, Academic Cheating Experience, and Political Activity*, 2014). Sikap terhadap korupsi juga berkaitan dengan hedonisme (Falah, *Hedonisme dan Sikap Terhadap Korupsi*, 2013).

Pemberantasan korupsi di Indonesia terus-menerus digencarkan, namun faktanya gerakan ini menghadapi berbagai hambatan, di antaranya adalah sikap masyarakat terhadap korupsi yang cenderung hipokrit: secara formal korupsi dihujat, namun fakta keseharian menunjukkan bahwa perilaku korup sering dipersepsi sebagai tindakan yang wajar (Falah, *Perilaku Korup di Mata Mahasiswa*, 2012) Faktor budaya di Indonesia dianggap sebagai salah satu aspek yang mendorong individu melakukan korupsi, mengingat korupsi merupakan bagian dari 'kebiasaan' (Sujatmiko, 2002).

Sebuah penelitian yang didasarkan pada persepsi dari 18.000 orang individu menemukan bukti empiris mengenai pengaruh

dari nilai-nilai penghindaran yang tidak jelas, penerapan orientasi kemanusiaan, dan praktik kolektivitas pada individu terhadap tingkat korupsi, setelah mengontrol variabel perkembangan ekonomi dan manusia. Hasil ini memperkuat upaya untuk membangun teori umum mengenai korupsi dari perspektif budaya (Seleim & Bontis, 2009).

Efek sosial memainkan peran yang penting dalam menentukan bagaimana individu menyikapi korupsi yang terjadi di sekitarnya, dan secara tegas dikaitkan dengan tingkat toleransi terhadap korupsi di lingkungan tersebut. Hal ini terbukti dari analisis terhadap data pada level individu yang diperoleh dari tiga puluh lima negara di bawah koordinasi Lembaga Penelitian Sosial di Michigan University (Gatti, Paternostro, & Rigolini, 2003). Pernyataan tersebut dikuatkan oleh studi eksperimen mengenai budaya korupsi di Brazil, yang membuktikan bahwa intensi untuk melakukan korupsi semakin meningkat saat individu mendapatkan paparan yang berisi gambaran korupsi (Fischer, Ferreira, Milfont, & Pilati, 2014).

Para peneliti dari World Bank dan New York University menemukan bahwa di wilayah yang rata-rata populasinya tidak terlalu menunjukkan penolakan terhadap korupsi, maka individu-individu di dalamnya juga cenderung lebih mudah memaafkan perilaku korup (Gatti, Paternostro, & Rigolini, 2003).

METODE

Riset yang mendasari tulisan ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode kualitatif diharapkan membantu menangkap ketepatan dan orisinalitas dari realita permasalahan sosial yang sesuai dengan konteks dan budaya Indonesia (Somantri, 2005).

Disain penelitian ini adalah fenomenologi, yang dipilih atas dasar pertimbangan bahwa penelitian ini mencoba mengungkap korupsi dari perspektif psikologi budaya. Fenomenologi adalah disain penelitian kualitatif yang difokuskan pada upaya untuk mendapatkan

makna dari pengalaman hidup subjek di dalam fenomena yang diteliti (Creswell, 1998). Pengalaman hidup yang dimaksud di sini adalah pengalaman subjek sebagai pengelola sekolah dalam menghadapi fenomena sosial berupa perilaku korupsi kolektif yang terjadi secara intensif di dalam sistem di mana subjek bekerja, bagaimana subjek mempersepsi dan memaknai peristiwa ini, dan bagaimana dinamika psikologis yang terjadi sehingga subjek mampu bertahan menerima fenomena ini sebagai bagian dari kehidupannya dalam dunia kerja.

Fenomenologi sosial bertujuan untuk merumuskan ilmu sosial yang mampu ‘menafsirkan dan menjelaskan tindakan dan pemikiran manusia’ dengan cara mendeksripsikan struktur-struktur dasar, di mana subjektivitas menjadi prinsip yang tidak boleh dilupakan ketika para peneliti sosial memaknai objek-objek sosial (Holstein & Gubrium, 2009).

Pengumpulan data dalam studi kualitatif yang memiliki disain fenomenologis diprioritaskan pada metode *indepth interview* (Creswell, 1998).

Wawancara sendiri merupakan “bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar”, yang harus diakui bukan merupakan alat pencipta realitas yang netral, berfungsi untuk menciptakan pemahaman situasional yang berasal dari “episode-episode interaksional khusus”, dan merupakan metode yang sulit dipisahkan dari pengaruh karakteristik individu peneliti (Denzin & Lincoln, 2009).

Narasumber dalam riset ini adalah individu-individu yang sedang atau pernah menjadi pengelola sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau staf bagian keuangan, baik di institusi pendidikan tingkat dasar atau tingkat menengah di wilayah X.

Analisis dilakukan melalui metode horisonalisasi, yaitu dengan mengkategorikan data yang diperoleh dari lapangan dan menarik makna atau kesimpulan dengan dukungan perspektif teoritis untuk menjelaskan makna atau kesimpulan tersebut (Poerwandari, 1998).

Sesuai dengan asumsi metodologis dalam pendekatan kualitatif, proses yang dilakukan bersifat induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang didasarkan pada peristiwa khusus ke arah konteks yang lebih umum (Creswell, 1998).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk penyimpangan yang disaksikan langsung oleh para subjek adalah: (1) Sekolah menerima dana dengan besaran yang lebih kecil dari jumlah yang seharusnya diterima; (2) Sekolah menandatangani jumlah angka yang lebih besar daripada dana kongkrit yang diterima, dan terpaksa membuat laporan fiktif untuk menutupi dana yang tidak diterima; (3) Pihak pengelola sekolah harus memberikan sejumlah uang pada oknum-oknum yang mengelola dana pendidikan, berdasarkan kesepakatan dan tanpa tanda terima atau kuitansi, dengan tujuan agar sekolah tidak dipersulit dalam menerima bantuan; (4) Pihak sekolah membuat proposal permintaan bantuan yang bersifat fiktif dengan tujuan memenuhi kebutuhan pada pos lain yang berbeda dengan pos yang tercantum di proposal.

Seluruh subjek menyatakan bahwa bentuk-bentuk tindakan di atas bertentangan dengan nilai pribadi mereka, tetapi subjek-subjek ini mengaku “tidak berdaya” melawannya sehingga mau tidak mau terpaksa menyesuaikan diri dengan sistem atau cara kerja yang koruptif yang sudah menjadi budaya.

Tindakan memberi semacam upeti atau setoran pada pihak-pihak yang memiliki wewenang mengurus penyaluran dana bantuan pendidikan diakui memberikan dampak yang signifikan pada kesempatan sekolah mendapatkan bantuan dana. Ironisnya, aktivitas semacam itu dianggap sebagai sopan santun sosial, bahkan “kewajiban” yang berarti lingkungan menuntut subjek untuk melakukan hal tersebut dan tidak memberi pilihan untuk menolak.

“Yah itu kita anggap sebagai tanda terima kasih...” (Subjek-AM, 2014)

“Bahkan kemarin itu kan saya telat... terus diingatkan, “Nanti di sana jangan lupa kewajibannya...”” (Subjek-AP, 2014)

Tekanan makin kuat ketika lingkungan tidak mendukung idealisme pribadi subjek. Subjek yang merasakan konflik batin karena pertentangan antara nilai pribadi dengan tuntutan kenyataan mendapatkan tekanan dari lingkungan sosialnya untuk menerima hal semacam itu sebagai kewajiban, seperti yang diungkapkan subjek:

“Kalo *sharing* dengan kepala-kepala sekolah yg sebelum saya juga dibilangi ‘*halah biasa lak wis to...* (udah biasa aja)’. Saya mesti digituin. ‘*Ora sah dipikir mumet-mumet* (jangan dipikir pusing-pusing)’. Bahkan sepupu saya, dia kepala SMK, bilang ‘*uwis to, kuwi lha duit duite kana, kana meh njaluk laporan piye wis garek manut kana wae to* (sudahlah, itu kan uang mereka, mereka mau minta laporan seperti apa udah tinggal nurut aja),’ gitu sampe bilangnyanya. ‘*lha kowe kok malah stres ki ngopo* (lha kamu kok malah stres kenapa)’ sampe digituin saya” (Subjek-AP, 2014)

Ini sesuai dengan pendapat Stanley Milgram menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang tidak berdaya menghadapi ikatan jaring-jaring sosial yang membatasi ruang geraknyanya. Individu sering terpaksa patuh saat diminta melakukan hal-hal yang sebetulnya bertentangan dengan hati nuraninya (Wade & Tavris, 2007).

Ada salah seorang subjek yang mengaku mengalami kesulitan beradaptasi dengan sistem yang koruptif dan setelah satu semester diangkat menjadi pengelola sekolah, subjek tersebut mengajukan pengunduran diri, namun pengunduran diri tersebut baru dipenuhi semester berikutnya. Subjek ini mengalami konflik psikologis yang signifikan saat berada di dalam sistem yang bertentangan dengan nilai-nilai pribadinya, frustrasi, menunjuk-

kan gejala-gejala depresi dan menurunnya motivasi kerja secara drastis..

Berbeda dengan subjek di atas yang akhirnya mengundurkan diri dari jabatan pengelola sekolah (dan memilih menjadi guru biasa), subjek-subjek lain tetap bertahan dalam sistem. Para subjek mengakui bahwa di masa-masa awal mengetahui sistem yang korup mereka “kaget”, tetapi akhirnya menerima dan pasrah. Seluruh subjek, baik yang bertahan dalam sistem maupun yang mengundurkan diri, tidak ada yang mencoba upaya signifikan untuk mencegah, menolak, atau melawan. Bahkan individu melakukan rasionalisasi untuk membenarkan ketidakmampuannya menolak tekanan untuk melakukan perbuatan koruptif, seperti yang dikemukakan para subjek:

“Kalo menurut saya seharusnya nggak kayak gitu...tapi itu sudah lingkarannya...” (Subjek-AA, 2014)

“Kalo menurut prinsip pribadi ya sebetulnya itu tidak boleh. Tapi kalau tidak mau nanti *diblacklist*, besok nggak dapat lagi.” (Subjek-AM, 2014)

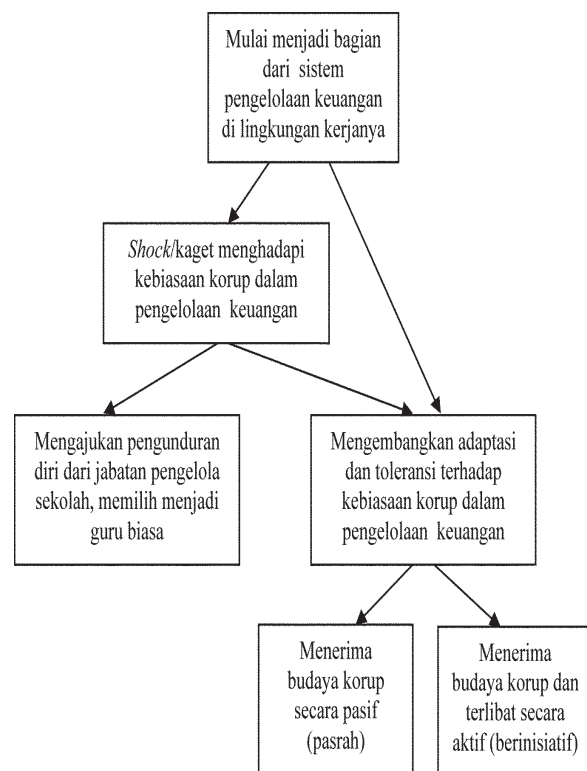
“Jadi kita ni memang gak bisa ngapa-ngapain. Harus mengikuti mereka, sistemnya mereka. Akhirnya tu kan kita tu pengennya mau begini, begini, tapi nanti menyusahkan yang lain... kalo kita tetep egonya tinggi seperti itu to, ya kan kasihan juga sekolahnya.” (Subjek-AP, 2014)

Subjek meyakini bahwa keterlibatan yang terus-menerus dalam sistem yang korup bisa membuat individu meninggalkan nilai-nilai pribadi dan pada akhirnya menjadi bagian dari sistem budaya yang menganut nilai yang bertentangan, seperti yang dikemukakan salah satu subjek:

“Memang akhirnya kita melakukan itu tu terpaksa. Bener2 terpaksa. Tetapi ketika ada pusingan, misalnya kayak pusingan, di tengah itu, kita di pinggirnya ini, lama-lama kan kita juga masuk. ... lama2 itu melu jadi setan juga gitu lho... tapi memang yang paling saya takutkan itu. Mi-

salkan sekarang memang sangat terpaksa... tapi lama kelamaan saya juga tidak bisa menjamin... karena prosesnya itu... Ada yang awalnya dia nangis-nangis malah, maksudnya dengan kondisi seperti itu... lha sekarang dia malah pintar (korupsi) ...” (Subjek-AP, 2014)

Proses adaptasi individual para subjek secara umum bisa digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1

Proses adaptasi para subjek terhadap budaya korupsi yang dihadapi di lingkungan kerjanya

Alasan yang digunakan para subjek untuk merasionalisasi toleransi dan keterlibatannya dengan sistem korupsi adalah: (1) Ini merupakan lingkaran sistem yang kuat (ada subjek yang menyebut dengan istilah “sudah permanen”); (2) Subjek tidak memiliki kekuatan atau wewenang untuk menolak; (3) Subjek terpaksa mengikuti sistem ini demi kepentingan sekolah atau institusi, bukan untuk

kepentingan pribadinya sendiri.

Para subjek melakukan adaptasi untuk mengompromikan nilai-nilai pribadinya untuk menghindari terjadinya ketidakseimbangan psikologis. Saat menghadapi pertentangan antara idealisme dengan kenyataan, individu akan dipaksa untuk memutuskan pilihan di antara dua hal yang bertentangan tersebut, sebab bila dia membiarkan dirinya terus-menerus berada dalam konflik batin atau kebimbangan, keseimbangan psikologisnya akan terganggu.

Hasil penelitian ini menguatkan teori dan hasil-hasil penelitian yang sebelumnya yang menunjukkan bahwa tekanan sosial dan budaya memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi sikap individu terhadap korupsi dan mendorong keterlibatan individu dalam aktivitas korupsi.

SIMPULAN DAN SARAN

Perilaku korupsi di Lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah di wilayah X merupakan bagian dari perilaku sistemik yang sudah menjadi budaya. Individu yang nilai-nilai pribadinya berlawanan dengan sistem yang korup tidak mampu melawan tekanan sosial sehingga terpaksa melakukan adaptasi dan rasionalisasi untuk menjaga keseimbangan psikologisnya.

Hasil penelitian ini, bagaimanapun juga diharapkan membantu memberikan gambaran proses pewarisan budaya korupsi pada individu-individu yang semula “bersih” hingga menjadi bagian dari budaya korupsi tersebut. Pengetahuan dan kesadaran tentang adanya proses ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dalam gerakan besar pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu dengan memikirkan upaya penguatan individu agar mampu menolak keterlibatan dalam aktivitas korupsi, sehingga individu tidak menjadi bagian yang ikut mendukung pelanggaran budaya korupsi.

Penelitian ini dilakukan di dalam area yang terbatas dan dengan jumlah subjek yang

terbatas pula, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat suatu generalisasi.

Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mempelajari topik yang sama disarankan untuk memperluas dan memperbanyak subjek penelitiannya, serta memanfaatkan kombinasi dari metode kuantitatif dan kualitatif, mengingat setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Coughlan, S. (2013). *Corruption and bribery in the classroom*. Dipetik September 27, 2014, dari BBC News: file:///H:/documents/Jurnal/Corruption%20and%20bribery%20in%20the%20classroom%20-%20BBC%20News.html
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative inquiry and research design. choosing among five traditions*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of qualitative research*. (S. Z. Qudsy (ed.) & B. S. Dariyatno (terj.)) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djunaidy, M. (2012, April 4). *Kasus korupsi BOS, 900 kepala sekolah diperiksa*. Dipetik September 27, 2014, dari Tempo.co: file:///H:/documents/Jurnal/Kasus%20Korupsi%20BOS%20900%20Kepala%20Sekolah%20Diperiksa%20_%20nasiona1%20_%20Mobile%20Tempo.co.html
- Falah, F. (2014). Attitude toward corruption, academic cheating experience, and political activity. Dalam I. Noormansyah, & R. Maronrong (Penyunt.), *Proceeding ICBESS 2014 The 1st International Conference on Business, Economics and Social Sciences* (hal. 12). Kuta Bali: Indonesia College of Economics (STEI) Jakarta.
- Falah, F. (2013). Hedonisme dan sikap terhadap korupsi. Dalam J. Kuncoro, R. Arjanggal, F. Falah, E. A. Setiowati, & R. Supradewi (Penyunt.), *Prosiding Seminar Nasional Psikologi 2013 “Memban-*

- gun Harmoni Melalui Kearifan Lokal” (hal. D-49 - D-60). Semarang: Fakultas Psikologi Unissula.
- Falah, F. (2012). Perilaku korup di mata mahasiswa. *Seminar Nasional Psikologi Islami, Aplikasi Psikologi Islami dalam Pendidikan Karakter* (hal. 151-158). Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fischer, R., Ferreira, M. C., Milfont, T., & Pilati, R. (2014). Culture of corruption? the effects of priming corruption images in a high corruption context. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 1-12.
- Gatti, R., Paternostro, S., & Rigolini, J. (2003). *Individual attitudes toward corruption: do social effects matter?* World Bank Policy Research.
- Hermanto, A. (2014). *Kepala sekolah didakwa korupsi BOS Rp86 juta*. (Sulaiman, Penyunting) Dipetik September 27, 2014, dari Lampost.co: file:///H:/documents/Jurnal/Kepala%20Sekolah%20Didakwa%20Korupsi%20BOS%20Rp86%20Juta.html
- Heyneman, S. P. (2004). Education and corruption. *International Journal of Educational Development*, 24, 637-648.
- Holstein, J. A., & Gubrium, J. F. (2009). Fenomenologi, etnometodologi, dan praktik interpretif. Dalam N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, & S. Z. Qudsy (Penyunt.), *Handbook of Qualitative Research* (Dariyatno, B. S. Fata, Abi, & J. Rinaldi, Penerj., hal. 335-348). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, R. W., Widowati, N., & Rihandoyo. (2013). Implementasi kebijakan penggunaan dana bantuan operasional sekolah di kota semarang (studi kasus di sekolah menengah pertama negeri semarang selatan tahun 2011). *Journal of Public Policy and Management Review*, 2 (1).
- Nurdiansyah, R. (2014, Agustus 15). *Jaksa kantong bukti suap murid baru*. (Ismail, Penyunting) Dipetik September 27, 2014, dari Republika Online: <http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/14/08/15/nac5tn-jaksa-kantongi-bukti-suap-murid-baru>
- Osipian, A. L. (2009). Corruption and reform in higher education in ukraine. *Canadian and International Education*, 38 (2), 103-122.
- Poerwandari, E. K. (1998). *Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia, pengantar fuad hasan* (Edisi Revisi ed.). Jakarta: Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Fakultas Psikologi UI.
- Puspitarini, M. (2013). *DAK & BOS sasaran korupsi di bidang pendidikan*. Dipetik September 27, 2014, dari okezone.com: file:///H:/documents/Jurnal/DAK%20&%20BOS%20Sasaran%20Korupsi%20di%20Bidang%20Pendidikan%20-%20m.okezone.com.html
- Rabl, T. (2011). The impact of situational influences on corruption in organizations. *Journal of Business Ethics*, 100, 85-101.
- Rachmawati, I. (2014). *Dua PNS banyuwangi tertangkap tangan terima suap Rp 211 juta*. Dipetik September 27, 2014, dari Kompas.com Regional: file:///H:/documents/Jurnal/Dua%20PNS%20Banyuwangi%20Tertangkap%20Tangan%20Terima%20Suap%20Rp%20211%20Juta%20-%20Kompas.com.html
- Sapa. (2014). *Massive corruption in schools, finds report*. Dipetik September 27, 2014, dari Mail & Guardian: file:///H:/documents/Jurnal/Massive%20corruption%20in%20schools%20finds%20report%20-%20Mail%20&%20Guardian%20Mobile.html
- Seleim, A., & Bontis, N. (2009). The relationship between culture and corruption: a cross-national study. *Journal of Intellectual Capital*, 10 (1), 165-184.
- Somantri, G. R. (2005). Memahami metode kualitatif. *Makara, Sosial Humaniora*, 9 (2), 57-65.

Sujatmiko, I. G. (2002). Hypercorruption dan strategi pemberantasan korupsi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2 (1), 25-30.

Transparency International. (2014). *Corruption perceptions index 2014: results*. Dipe-tik Desember 8, 2014, dari Transparency

International: <http://www.transparency.org/cpi2014/results>

Wade, C. & Tavris, C. (2007). *Psikologi, edisi ke-9*. (W. Hardani, B. A. Yoso, Penyunt., B. Widyasinta, & I. D. Juwono, Penerj.) Jakarta: Penerbit Erlangga.